

SEJARAH ISLAM: KASUS SEKULARISME TURKI

Isputaminingsih

FKIP Universitas Sriwijaya
nadiaappnorman@yahoo.com

Abstrak: Kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani dengan *Syaikhul Islam*-nya, sebagai sebuah lembaga agama berpendapat bahwa Islam tidak cocok dengan sekularisme. Pemikiran ini bertitik tolak pada pandangan Sultan, "*ideologi politik dan negara tidak mungkin dipisahkan dari konsep Islam yang tidak memisahkan urusan negara dari urusan agama*". Pandangan ini bertolak belakang sejalan dengan perkembangan sejarah masyarakat Turki yang beriringan dengan masuknya imperialisme Barat ke dunia Islam yang membawa konsep pemikiran sekularismenya yaitu *memisahkan urusan politik (Negara) dari agama*. Konsep sekularisme ini akhirnya mempengaruhi golongan modernis Turki di bawah pimpinan Kemal Ataturk menuju Turki Modern yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Kemal Ataturk melaksanakan politik sekularismenya? Bagaimana Turki dapat melaksanakan politik sekularismenya mengingat mayoritas masyarakat Turki beragama Islam? Oleh karena itu, sudah sepatutnya umat Islam lebih terbuka dalam mendeskripsikan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sesuai dengan konteksualnya bukan hanya melihat tekstualnya saja. Persoalan yang timbul adalah, dapatkah Islam dan sekularisme terjalin secara sinergi? tentunya hal ini susah untuk dijawab. Namun alangkah eloknya jika persoalan ini dikembalikan pada cara pandang atau interpretasi kita terhadap agama dan sekularisme yang dipahami. Materi sekularisme Turki ini perlu dijadikan materi pembelajaran dalam mata kuliah Sejarah Islam karena sekularisme yang dilaksanakan Turki ini berpengaruh pada perkembangan sejarah Islam dalam konsep pemerintahan.

Kata Kunci: Islam, Sekularisme, Turki

Pendahuluan

Peradaban Islam yang dipengaruhi oleh peradaban Arab dan Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan Dinasti Utsmani. Selanjutnya arah modernisasi yang berkiblat ke Barat telah menyerap unsur-unsur budaya Barat yang dianggap modern. "Campuran peradaban Turki, Islam dan Barat, inilah yang telah mewarnai identitas masyarakat Turki yang dianggap Kemal Ataturk sebagai penghambat kemajuan Turki" (Asari, 2007:134). Kemal menginginkan sebuah peradaban baru bagi bangsa Turki, yang dapat mengantarkan Turki di abad ke-20 pada kejayaannya melalui peradaban Barat dengan sekularisasinya di berbagai bidang kehidupan, menggantikan Kesultanan Turki

yang absolut berdampingan dengan kekuasaan Syaikhul Islam sebagai sebuah lembaga agama yang berkuasa dan berwenang dalam urusan negara. Tirani Kesultanan inilah yang dianggap kaum nasionalis Turki menghambat kemajuan Turki dalam era-modernisasi.

Masyarakat dunia termasuk Indonesia, mengenal Turki sebagai sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang pernah memimpin dunia Islam selama tujuh ratus tahun, dari permulaan abad ke-13 hingga jatuhnya Kekhalifahan Utsmani pada awal abad ke-20. Fenomena kehidupan masyarakat Turki menjadi menarik ketika Kemal Ataturk pada tahun 1923 menyatakan Turki sebagai sebuah *negara sekular* berbentuk *republik*. Islam yang telah berfungsi sebagai agama

dan sistem hidup bermasyarakat dan bernegara selama lebih dari tujuh abad, dijatuhkan peranannya dan diganti dengan sistem Barat dengan *konsep sekularismenya*.

Persoalan yang timbul adalah, bagaimana masyarakat Turki dengan mayoritas Islam dapat bersinergi dengan sekularisme? Tentunya penjelasan dari pertanyaan ini sangat bergantung pada interpretasi agama dan sekaligus sekularisme itu sendiri yang dipahami masyarakat Turki setelah runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. “para guru, jurnalis dan ahli hukum, memandang tidak berarti bahwa suatu pemerintahan yang sekular bertentangan dengan agama. Mereka menerima agama, namun tidak menjadikan agama itu sebagai dasar legitimasi dalam menjalankan pemerintahannya, tetapi kaum Muslim konservatif menentang system sekular dari pemerintah”(Jameelah, 1965: 146 ; Ali : 126). Inilah suatu hal yang ironis dalam kehidupan masyarakat Turki, yang ratusan tahun hidup dalam dunia Islam, dapatlah dikatakan sebagai suatu hal yang dipaksakan menerima sekularisme sebagai tatanan baru dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah ini perlu dianalisis, mengingat Turki sebagai negara Islam yang sangat berjaya dimasanya akhirnya tenggelam dalam sentuhan *sekularisme*. Pertanyaannya mengapa Turki mengambil sekularisme sebagai salah satu cara menyelamatkan bangsa dan negaranya. Fenomena sejarah Turki ini penting sebagai tambahan materi ajar pada mata kuliah Sejarah Islam, karena dapat memberikan deskripsi bagi mahasiswa sejarah, mengenai pengaruh sekularisme Turki terhadap perkembangan sejarah Islam.

Sekularisme Arti dan Sejarahnya

Istilah *sekular*, *sekularis*, *sekularisme* dan *sekularisasi* merupakan persoalan-persoalan penting yang mempengaruhi kaum Muslim. Secara harfiah, “*sekular* berasal

dari bahasa Latin yaitu *Saeculum* yang berarti *temporal*; *duniawai*, *masa (waktu)* atau tidak berhubungan dengan masalah agama dan spiritual secara khusus” (Harahap, 1994:12).

Kata *sekularisme* yang diterjemahkan dalam bahasa Arab adalah *Ilmaniyah* merupakan translasi dari kata *secularism* dalam bahasa Inggris yaitu suatu paham keduniwian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:797)“*sekularisme* adalah paham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama”. Sementara itu “*sekularisasi* adalah cara hidup yang memisahkan urusan agama dari urusan negara. *Sekularis* adalah orang yang berpegang pada ajaran sekularisme dan memperaktekkan sekularisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”(Harahap, 1994:14). Dapatlah dikatakan sekular berarti duniawi atau bersifat keduniaan, artinya masalah dunia tetap dijadikan masalah dunia dan masalah agama (akhirat) tetap dijadikan masalah agama, dengan demikian sekular adalah melepaskan urusan dunia ini dari urusan agama.

Akar *sekularisme* berasal dari benua Eropa, yang disebabkan oleh arogansi dan dominasi gereja yang absolut berdampingan dengan feodalismenya dan bersikap diskriminatif terhadap rakyat, sehingga ketidakadilan ini sangat dirasakan masyarakat Eropa pada abad pertengahan hingga datangnya *Renaissance*. *Renaissance* ini menyebabkan lahirnya benih-benih anti agama, dan gerakan pembebasan melawan kondisi yang tidak adil serta kebobrokan gereja yang meliputi masyarakat Eropa pada saat itu. Kondisi ini melahirkan apa yang dinamakan dengan *sekularisme*, yang mulai tertanam dan berkembang ditengah masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Qutb (1986: 3)“ *Kebobrokan*, yang terjadi sebagai akibat dari dukungan gereja terhadap

feodalisme, sehingga menekan massa. *Ketidakadilan*, terjadi karena tindakan gereja yang menganiaya dan mengeksekusi para sarjana dan ilmuwan seperti *Galileo*, dan *Corpenicus*, yang berhasil menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dari gereja dan membuktikan tentang kebenaran dalam agama kristen". Kekecewaan masyarakat Eropa ini memperkuat dan mempertegas tokoh reformis Eropa untuk melaksanakan sekularisme dalam kerangka kemajuan peradaban Barat yang sebelumnya terhalang oleh tradisi *kristianitas*.

Bagi bangsa Eropa sekularisme mengajarkan manusia untuk memalingkan mukanya dari *dunia lama* menuju *dunia baru* dan *dunia masa datang*. Demikian Romein, (1951:193), mengatakan "pada zaman ini lahirlah semboyan bangsa Eropa yaitu *carve diem* (nikmatilah hidup ini) dengan meninggalkan semboyan zaman kegelapan yaitu *momentumori* (ingatlah akan mati)". Sebagai realisasi semboyan *carve diemnya* ini, bangsa Eropa memulai *renaissance* dan reformasi disegala bidang kehidupan serta melaksanakan imperialismenya di dunia Timur, termasuk Kesultanan Turki Utsmani, yang tidak dapat menghadapi kemajuan dunia Barat dalam sains dan teknologinya, sehingga Turki mengalami masa kemunduran dalam kancah politik dunia. Dengan demikian ada dua faktor yang mendorong Turki melaksanakan sekularismenya yaitu:

Latar Belakang Turki Melaksanakan Sekularisme

Sebagaimana dunia Barat, dunia Islam tidaklah homogen, setiap negara mempunyai perbedaan yang mendasar meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam, "namun komunalitas agama tidak berarti komunalitas sosial dan tradisi politik" (Mun'im A Sirry, 2002:22). Dalam hal ini dapat dilihat, kasus di Turki dengan mayoritas penduduknya Muslim dengan

karakter pluralis, memilih bentuk pemerintahan yang cocok untuk masyarakat pluralis, yang akhirnya bermuara pada karakter sekular dengan merubah sistem pemerintahan dari Kesultanan Turki menjadi Republik Turki, tetapi tidak berarti pemerintahannya yang sekular bertentangan dengan agama, tetapi Turki tidak menjadikan agama itu sebagai dasar legitimasi dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun latar belakang Turki melaksanakan sekularismenya yaitu:

Kemunduran Turki dalam Kancah Politik Dunia Akhir abad 19--20

Momentum pertama kontak antara Turki dengan dunia Barat adalah jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Bizantium, ke tangan pasukan Turki Utsmani dibawah pimpinan Sultan Muhammad II pada tahun 1453. Konstantinopel yang selanjutnya berganti nama menjadi Istanbul, adalah suatu kota metropolis yang berada di benua Asia dan Eropa. Inilah titik awal masa keemasan Turki Utsmani, yang terus cemerlang hingga abad ke-18 dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas membentang dari Hongaria Utara di Barat hingga Iran di Timur; dari Ukraina di Utara hingga Lautan India di Selatan.

Turki Utsmani berhasil membentuk suatu Imperium besar dengan masyarakat yang multi-etnis dan multi-religi. Kebebasan dan otonomi kultural yang diberikan Imperium kepada rakyatnya yang non-muslim, adalah suatu bukti bagi dunia kontemporer bahwa sistem Kekhalifahan dengan konsep Islam telah mempertunjukkan sikap toleransi dan keadilan yang luhur. "Sultan adalah sekaligus khalifah, artinya sebagai pemimpin negara, Ia juga memegang jabatan sebagai pemimpin agama, ini sebagai faktor penghambat kemajuan Turki abad ke-19 pada saat Barat telah menguasai sains dan teknologinya" (Gibb, 1960:132), kondisi ini sebagaimana yang

terjadi pada zaman kegelapan pada abad pertengahan di kawasan Eropa, dimana Raja merangkap sebagai kepala negara dan kepala agama (gereja) telah banyak menghambat kemajuan bagi bangsa Eropa, sementara dunia Islam (Timur) mengalami zaman keemasannya dimana banyak melahirkan para ilmuwannya diberbagai bidang ilmu pengetahuan.

Dalam Kekhalifahan Turki Utsmani didukung oleh pertama kekuatan ulama (*Syaikhul Islam*) sebagai pemegang hukum *syariah* dan kedua kekuatan tentara, yang dikenal dengan sebutan tentara *Janissari*. Kekuatan militer yang disiplin inilah yang mendukung perluasan Imperium Utsmani, dan juga menyebabkan keruntuhannya pada abad ke-20. karena perkembangan sains dan teknologi modern bangsa Eropa, telah mematikan langkah Turki dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya, sehingga mereka merasakan perlu sebuah konsep baru dalam membangun kembali Turki.

Setelah Perang Dunia I pada tahun 1914-1918, dengan kekalahan pihak Sentral yang didukung oleh Turki, imperium Turki Utsmani mengalami masa kemuduran yang sangat menyedihkan. Satu persatu wilayah kekuasaan yang jauh dari pusat membebaskan diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Bahkan lebih buruk lagi negara-negara sekutu berupaya membagi-bagi wilayah kekuasaan Turki untuk dijadikan negara koloni mereka. Kondisi porak porandanya imperium Turki, menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda Turki ketika itu. Sehingga pemikiran tentang identitas bangsa dan pentingnya suatu negara nasionalis yang meliputi bangsa Turki perlu segera diwujudkan. Hal ini ditunjukkan oleh "elite birokrasi dan militer yang sudah siap dengan komitmennya dari sebuah rezim multi-nasional dan multi-religius menjadi negara nasional Turki dan sekular"(Lapidus,1999:83-84).

Tumbuh dan Berkembangnya Westernisme, Nasionalisme dan Sekularisme

Tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Barat berjalan seiring dengan revolusi Perancis yang bergandengan dengan revolusi Industri dan revolusi sosial telah melahirkan kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme modernnya. Dalam rangka inilah desakan kebutuhan ekonomi industrial untuk bahan-bahan mentah dan pasar, mengakibatkan persaingan politik dan ekonomi antara negara Eropa, sehingga timbul keinginan untuk menjalankan stelsel baru di negeri jajahannya, antara lain memperkenalkan sistem pendidikan Barat dalam rangka mendapatkan tenaga terampil dan murah. Menggunakan semboyan "*The White man's Burden* (hanya bangsa Eropa dikarunai Tuhan sebagai bangsa yang terbaik), maka bangsa Eropa dengan kedok sebagai "*Mission Sacre* yaitu suatu misi untuk memperadabkan bangsa Timur, memulai penjajahannya secara modern pada abad ke-19" (Romein, 1953:134), sehingga pada awal abad ke-20, sudah terjadi *Balance of power* antara negara pejajah dimana mereka sudah menancapkan kekuatannya di negeri jajahan masing-masing.

Belanda telah menuntaskan penaklukannya terhadap Indonesia, Rusia di Asia Tengah, Inggris memperkokoh imperiumnya di India, Malaysia, Timur Tengah, Afrika Timur, Nigeria dan sebagian wilayah Afrika Barat, Perancis menguasai Afrika Utara dan sebagian wilayah Afrika Barat, sebagian Timur Tengah, sementara Jerman dan Italia juga membentuk koloninya di Afrika. Dampak dari *mission sacre* ini pada daerah jajahan hampir mencapai seluruh peradabannya yang mengantarkan bangsa Timur pada era modern sebagai daerah koloni.

Mission sacre Barat, memberikan transformasi pada kehidupan sosial-politik dan keagamaan bagi intelektual Muslim

yang berpendidikan Barat, sehingga mereka paham tentang arti sebuah bangsa, tanah air, liberalisme, rasionalisme, sekularisme, demokrasi, sosialisme, nasionalisme dan konsep-konsep lainnya dalam rangka kemajuan sebuah bangsa, sehingga "timbullah benih-benih penantang dalam stelsel penjajah sendiri yang diperlihatkan dalam lahirnya *Oosterse Reaissance* (lahirnya kesadaran kulit berwarna) akan harga diri, nasib bangsa dan negaranya"(L. Stodaard, 1966:62). Jadi ide nasionalisme dengan berbagai bentuknya telah menjadi tema utama pada negeri jajahan (dunia Timur), termasuk Turki.

Lahirnya golongan elite modern Turki yang berpendidikan Barat, ingin membangkitkan rasa nasionalisme di kerajaan Utsmani, karena daerah imperium Turki pada akhir abad ke-19, satu persatu jatuh ditangan kolonialis Inggris, Perancis, Rusia. Demikian perebutan kekuasaan dan perimbangan kekuatan Eropa terhadap daya ketahanan imperium Utsmani merupakan ajang kekuatan Eropa dalam melindungi kepentingan politik komersialnya di Laut-Tengah, Timur Tengah dan kawasan Asia-Afrika.

Kondisi sosial-politik Turki akhir abad ke-19, diambang keruntuhannya, karena persoalan dalam negara Turki sendiri maupun dari penetrasi imperialisme Barat, telah memposisikan kaum nasionalis untuk bangkit mengembalikan Turki pada masa kejayaannya. Menurut Nasution (1975:27) nasionalisme ini mereka kelompokkan dalam tiga kategori yaitu:

- 1) Ustmanisme yang memfokuskan pada semua wilayah yang berada dalam kekuasaan kerajaan Turki Utsmani merupakan tanah air Turki yang dibangun berdasarkan satu agama yaitu Islam, tetapi berusaha mengambil pola-pola budaya Barat.
- 2) Pan-Islamisme dimana konsep ini lebih menekankan pada semua rakyat yang

beragama Islam di bawah kekuasaan Turki Usmani adalah merupakan suatu nasionalitas.

- 3) Pan-Turanisme konsep ini lebih menekankan pada bahasa dan kebudayaan Turki sebagai penyatuan semua orang Turki dimanapun mereka berada adalah merupakan bangsa Turki.

Konsep-konsep nasionalisme ini telah menimbulkan kesadaran bagi kaum intelektual Turki di bawah kepemimpinan Kemal akan kondisi sosial politik dan keagamaan bangsa Turki pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang penuh dengan gejala politik dan kepentingan imperialisme modern. "Kondisi ini memicu kebangkitan Turki dari keterpurukannya dengan menggunakan peradaban Barat, lewat *sekularismenya* dalam rangka kemajuan bangsa Turki "(Syannawi, 2006:125). Dapatlah dikatakan bahwa Turki berkeyakinan melalui sekularisasi, revolusi budaya dan negara harus dilaksanakan menuju Turki modern.

Pelaksanaan sekularisme Turki

Dalam negara sekular, moto yang selalu diagungkan adalah agama milik Tuhan, sedangkan negara milik bersama dalam arti kata serahkan urusan Raja kepada Raja dan urusan Tuhan kepada Tuhan. kekuasaan Tuhan dan kekuasaan Raja dipandang sebagai dua hal terpisah. Moto ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip Islam, sebagaimana Al-Qur'an (al-Imran 154) menegaskan "*Semua urusan adalah milik Allah.* dalam (al- Hadid 3) dikatakan "*Ia adalah Tuhan yang pertama dan yang terakhir, Tuhan segala yang tampak dan segala yang tersembunyi. Ia maha tahu atas segala sesuatu*".

Ayat ini menjelaskan dalam dunia Islam persoalan agama dan Negara dua masalah yang saling isi mengisi atau saling berkaitan. Tetapi dalam urusan

bermasyarakat dan bernegara, Allah memberikan tugasnya kepada *ulu 'l-amr* (pelaksana urusan) berdasarkan kepada prinsip musyawarah (*syura*). sebagaimana dalam al- Qur'an (Al-Imran 159) menyebutkan "*urusan mereka (ummat) adalah syuro di antara sesama mereka*". Jadi jelas bahwa dalam politik Islam *etika syuro* merupakan tema utama dalam menjalankan pemerintahan. Demikian Abdullah Ahmed An-Na'im, (2007 : 24) mengatakan "dalam Islam tidak membedakan pemisahan antara urusan agama dan negara di satu sisi, serta keterhubungan Islam dan politik di sisi lain dengan tidak meninggalkan prinsip *syuro*."

Dalam perspektif Islam, *sekularisme* adalah perwujudan modern dari faham

al-dahriyat. sebagaimana dalam al-Qur'an (al-Jasiyat 24) berbunyi: *dan mereka berkata "kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia ini saja, kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja"* demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi.

Dari ayat al-Qur'an ini, menunjukkan bahwa dalam sekularisme, tidak ada keyakinan kaum sekularis akan kehidupan lain, manusia mati karena masanya sudah berakhir. Sementara itu Rasulullah SWT, tidak pernah memisahkan antara sesuatu yang bernama sekular dan sesuatu yang bernama agama, dalam urusan dunia ini, semua hal dibolehkan dalam Islam, kecuali yang di larang.'

Sebagaimana dunia Barat, dunia Islam tidaklah homogen, setiap negara mempunyai perbedaan yang mendasar meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam, "namun komunalitas agama tidak berarti komunalitas sosial dan tradisi politik" (Sirry. 2002 : 22). Dalam hal ini dapat dilihat, kasus di Turki dengan mayoritas penduduknya Muslim dengan karakter

pluralis, memilih bentuk pemerintahan yang cocok untuk masyarakat pluralis sesuai dengan zaman dan perjalanan sejarahnya, akhirnya bermuara pada karakter sekular.

Dapat atau tidaknya Islam dan sekularisme bergandengan tangan sangat tergantung pada interpretasi agama dan sekularisme itu sendiri. Jika agama dipahami secara liberal sebagaimana berkembang di kalangan kaum konservatif, maka sulit bagi agama menjalin berkelindan dengan sekularisme yang senantiasa menuntut disposisi liberal dan pluralisme. Begitu juga jika sekularisme dipahami secara liberal oleh kaum konserfatif maka keduanya cenderung dikotomis, bahkan berbenturan. Inilah sebagai faktor penentu dalam perjuangan kaum modernis Turki di bawah pimpina Kemal Ataturk yang meruntuhkan kekuasaan *Khilafah* menjadi sebuah Negara Republik Turki, dalam rangka kemajuan bangsa Turki menghadapi modernisasi Barat. "menurut Kemal, Barat dapat maju karena melaksanakan *sekularisasi*, sehingga jika rakyat Turki ingin maju maka Turki harus mengadakan sekularisasi terhadap pandangan agama, hubungan sosial dan hukum"(Rosenthal, 1965:38). Memang Turki mengalami kemunduran karena dominasi agama terhadap institusi-institusi politik yang tidak sesuai lagi dalam menghadapi peradaban Barat, sehingga dalam rangka kemajuan Turki inilah tidak dapat dapat dihindarkan lagi untuk segera melaksanakan sekularisme melalui;

Reformasi Negara

Langkah *pertama* yang dilakukan Kemal sebagai pemimpin negara, adalah merubah bentuk negara dari *Kesultanan* menjadi *Republik* dengan menyingkirkan kekuasaan Sultan serta mengangkat keluarga Sultan yaitu Abdul Majid sebagai Khalifah yang akan dijadikannya sebagai lambang atau simbol pemersatu agama dan tidak menjadi penguasa

politik. Dalam perkembangannya, Kemal menghapuskan lembaga Kekhalifahan tahun 1924. Tahun 1928, Kemal menghapuskan pasal tentang "pencantuman *Islam sebagai agama negara* sehingga antara agama dan negara tidak ada lagi sangkut pautnya. Dan secara resmi tahun 1937, *prinsip sekularisme sebagai dasar konstitusional* diberlakukan" (Nasution, 1975:153). Sejak saat itu negara Turki resmi menjadi negara *Sekular*, yaitu memisahkan kehidupan keagamaan dari institusi-institusi negara.

Demikian, Kemal dengan paham sekularismenya berusaha mengawinkan antara nasionalisme Turki dengan westernisasi. "Westernisasi, sekularisasi dan nasionalisasi itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaruan Mustafa Kemal Atatürk. Tahap awal yang menjadi pembaruan Kemal adalah bentuk negara dan memisahkan pemerintahan dari agama" (Nasution, 1975:149). Tampak bahwa pemikiran Kemal banyak terobsesi pada pemikiran Barat, bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Sehingga pemerintahan republik ditegakkan di Turki dan menghapus kepemimpinan Sultan, sementara *Khalifah* diberi kekuasaan pada jabatan *spiritual* saja. Jelas sekali keinginan Kemal lebih diarahkan pada pembaruan di segala bidang kehidupan masyarakat Turki yang diusahakannya akselerasi ini dapat berjalan secepatnya.

Reformasi Agama

Reformasi agama adalah salah satu contoh tindakan ekstrim dari rezim Kemalis setelah penghapusan khalifah. Reformasi ini bertujuan untuk memisahkan agama dari kehidupan politik negara dan mengakhiri kekuatan tokoh-tokoh agama dalam masalah politik, sosial dan kebudayaan. Selain itu Mustafa Kemal juga mengajukan pemikiran tentang nasionalisme agama. Menurutnya agama merupakan suatu lembaga sosial dan karena itu harus disesuaikan dengan sosial

dan budaya masyarakat Turki. Jadi sebetulnya Kemal tidak menentang agama Islam. "baginya Islam adalah agama rasional, tetapi hendaknya disesuaikan dengan bumi Turki. Al-Qur'an perlu diterjemahkan dalam bahasa Turki agar dapat dipahami rakyat" (Jameelah, 1965:153). Dalam rangka inilah Suatu komite dibentuk di Fakultas Teologi di Universitas Istanbul untuk memodernisasikan Islam. Komite ini menyebarkan keinginan Mustafa Kemal untuk mengganti bentuk dan suasana mesjid seperti bentuk dan suasana gereja di negara-negara Barat, dengan menekankan pada: pentingnya mesjid yang bersih, dengan bangku-bangku dan ruang tempat menyimpan mantel; mewajibkan jamaah masuk dengan sepatu yang bersih, menggantikan bahasa Arab dengan bahasa Turki, menyediakan alat-alat musik ditempat shalat untuk memperindah bentuk shalat, dan mengubah teks-teks khutbah yang telah ada dengan khutbah yang berisi pemikiran agama berdasarkan filsafat Barat. Pada tahun 1932 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengganti pengucapan azan ke dalam bahasa Turki, yang amat ditentang oleh mayoritas masyarakat Muslim Turki. Namun "Fakultas Teologi dalam upayanya untuk mensekularkan agama dimana bahasa agama dalam sholat dan praktek ibadah dapat digagalkan kaum ulama" (Ali, 1994:89-90) tampaknya Mustafa Kemal Atatürk dengan keberaniannya mencoba mengikis habis sisa-sisa Islam dalam kehidupan bangsa Turki. Kemal berpandangan "jika pengaruh Islam sama sekali sudah hilang, barulah Turki bisa maju menjadi bangsa Modern dan dihormati" (Jameelah, 1965:165). Jelas reformasi agama, merupakan upaya Turkifikasi Islam atau nasionalisasi Islam ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah Kemalis dalam kehidupan beragama di masyarakat Turki.

Sekularisasi dan modernisasi di Turki pada masa Rezim Kemalis seperti

diuraikan di atas, mendapat tanggapan dari Bryan S. Turner (1984:318), seorang guru besar sosiologi di Universitas Flinders (Australia Selatan), yang menyimpulkan bahwa

”sekularisme tersebut merupakan suatu bentuk pemaksaan dari pemerintah rezim, bukanlah sekularisasi yang tumbuh sebagai suatu konsekuensi dari proses modernisasi seperti di negara-negara Eropa. Selain itu sekularisasi di Turki pada saat itu merupakan peniruan secara sadar pola tingkah laku masyarakat Eropa yang dianggap modern dan lebih maju”.

Pandangan Turner ini menunjukkan bahwa tema utama pandangan Kemal tentang pem-Barat-an adalah bahwa Turki harus menjadi bangsa Barat dalam segala tingkah laku. Hal ini dapat dilihat daridikeluarkannya kebijakan larangan menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap pakaian agama di tempat-tempat umum dan menganjurkan masyarakat Turki menggunakan pakaian sebagaimana orang-orang Barat berpakaian (berjas dan bertopi). Peraturan ini mulai efektif pada November 1925 dan hingga saat ini pemakaian jas sudah menjadi ciri umum dari masyarakat Turki.

Reformasi Bahasa

Selain reformasi agama, reformasi yang paling penting dari rezim Kemalis adalah reformasi bahasa. Tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin, berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Nasional Agung pada 3 Novemeber 1928. Tujuan reformasi bahasa adalah membebaskan bahasa Turki dari ‘belenggu’ bahasa asing. Penekanannya adalah pemurnian bahasa Turki dari bahasa Arab dan Persia. Mustafa Kemal mengadakan kunjungan di banyak tempat untuk mengajar

secara langsung tulisan baru pada rakyat Turki. Reformasi bahasa ini memberi sumbangan yang berharga bagi bangsa Turki dalam mempelajari sains dan teknologi Barat dengan seluas-luasnya.

Reformasi Hukum

Komite ahli hukum mengambil Undang-Undang sipil Swiss untuk memenuhi keperluan hukum di Turki menggantikan Undang-Undang Syariah, berdasarkan keputusan Dewan Nasional agung tanggal 17 february 1926. Undang-Undang Sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 4 Oktober 1926 antara lain tentang: menerapkan monogami; melarang poligami dan memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dalam memutuskan perkawinan dan perceraian. Sebagai konsekuensi dari persamaan hak dan kewajiban ini hukum waris berdasarkan Islam dihapuskan. Selain itu undang-undang sipil juga memberi kebebasan bagi perkawinan antar agama.

Pada I Januari 1935, pemerintah mengharuskan pemakaian nama keluarga bagi setiap orang Turki dan melarang pemakaian gelar-gelar yang biasa dipakai pada masa Turki Utsmani. Mustafa Kemal menambahkan nama Ataturk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1935 sistem kalender hijriyah diganti dengan sistem kalender masehi, hari Minggu dijadikan sebagai hari libur menggantikan hari libur sebelumnya yaitu hari Jumat.

Bagi kemalis, manusia Turki baru, tidak saja harus berpikiran rasional seperti orang-orang Eropa, tetapi juga harus meniru tata-cara berperilaku dan berpakaian seperti mereka. Sebagaimana dikeluarkannya ”Undang-undang tentang larangan menggunakan pakaian asli Turki, tanggal 3 Desember 1924” (Jameelah, 1965:168).

Reformasi Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Kemal mengeluarkan dekrit pada tanggal 7 Februari 1924 yang isinya "melepaskan semua unsur keagamaan dari sekolah-sekolah dan menyatakan penyatuan pendidikan dibawah satu atap yaitu berada di bawah Kementrian Pendidikan. Ini berarti penghapusan semua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan Islam terhadap sekolah" (Gokalp, 1959: 225). Tindakan Kemal ini menunjukkan keinginannya agar pendidikan itu harus dibebaskan dari kekuasaan syariat dalam rangka modernisasi Turki.

Tampaklah bahwa reformasi negara dan budaya, melalui pelaksanaan sekularismenya, Turki telah memperlihatkan proses dinamis dari penerimaan dan penolakan masyarakat Turki akan sebuah perubahan dalam menghadapi tantangan zaman bagi kelanjutan kejayaan bangsa Turki dalam era-modern, sungguh suatu hal yang menarik dalam sebuah fenomena sejarah Islam dalam kasus Turki.

Sekularisme Turki dan Materi Sejarah Islam

Turki dikenal sebagai sebuah Negara Kesultanan Islam, yang terletak di antara dua benua yaitubenua Asia dan benua Eropa, memegang peran penting dalam perkembangan sejarah peradaban Islam. Namun seiring dengan perkembangan sains dan teknologi Barat, Turki harus menerima kenyataan bahwa ada yang salah dalam penataan pemerintahan dan kehidupan sosial budaya Turki, karena wilayah kekuasaan Turki banyak yang melepaskan diri dari kekuasaan Turki dan tidak menjadikan Turki sebagai kiblat dalam menata Negara. Dalam kerangka inilah lahir ide-ide pembaharuan baik dari kalangan Sultan, golongan intelektual, maupun dari golongan militer, untuk mereorganisasi Negara Turki. Tampilnya Kemal dari golongan militer dengan jelas dan tegas

mengadopsi secara utuh peradaban Barat. Sekularisme menjadi pilihan dalam menata pemerintahan.

Pelaksanaan sekularisme di Turki telah merubah tatanan kehidupan bernegara dan kehidupan sosial budayanya. Inilah yang perlu dijadikan bahan materi pembelajaran sejarah Islam, karena selama ini materi sekularisme di Turki belum menjadi fokus materi pembelajaran, sementara hal tersebut memberikan sebuah konsep baru dalam tatanan perubahan politik dan social budaya dalam perkembangan peradaban Islam.

Perubahan tatanan Negara Turki dari Kesultanan menjadi sebuah Negara Republik Turki Sekular, merupakan sebuah fenomena dalam sejarah masyarakat Turki khususnya, dan dunia Islam umumnya. Turki sebagai pelopor Sekularisme dinegara Islam membawa pengaruh pada negeri jajahan, termasuk Indonesia, dimana pembentukkan Negara Republik, memberikan ruang yang luas bagi Negara dalam menata pemerintahan, tanpa ikut campur lembaga agama di dalamnya. Namun bukanlah berarti semua negara kebangsaan dapat bernegosiasi dengan sekularisme yang berpolakan Negara tidak mengurus agama dan agamapun tidak mengurus Negara. Hal ini berbeda dengan kasus di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan Sukarno (1964:452) ; "apabila proses Islamisasi ini berhasil, maka suatu saat kelak akan terbentuk masyarakat Islam, yang jiwa dan prilakunya disinari oleh ajaran-ajaran Islam. Jika ini terjadi, maka banjirnya Islam itu dengan sendirinya akan menjelma dalam segala putusan Badan Perwakilan Rakyat". Tampak bahwa Sukarno lebih menekankan padabagaimana fungsi Badan Perwakilan Rakyat dalam membuat keputusan dalam menata negara dan bangsa sebagaimana yang diajarkan dalam al-qur'an dan hadis, sehingga agama berperan dalam negara dan negara memberikan ruang dan tempat pada agama.

Penutup

Lahirnya Ide-ide pembaruan sebagai dampak dari masuknya paham-paham Barat ke Turki seperti Westernisme, Nasionalisme, dan sekularisme, menyadarkan golongan pembaruan Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Ataturk yang lebih agresif untuk meninjau kembali sistem pemerintahan Kesultanan Turki dengan lembaga politik *syaikhul Islam*. Ketertinggalan Turki dalam kancah politik dunia akhir abad ke 19 memasuki abad ke 20, mendorong Kemal Ataturk untuk mengambil alih kekuasaan dan merubah sistem pemerintahan dari Kesultanan Turki menjadi Republik Turki.

Melalui sekularismenya, Kemal Ataturk, melaksanakan pembaharuan Turki dengan cara (1), mereformasi Negara yaitu merubah Turki dari Kesultanan menjadi Republik. (2), mereformasi agama bertujuan untuk merasionalisasikan agama yaitu memisahkan agama dari urusan negara dan mengakhiri kekuasaan Syaikhul Islam sebagai sebuah lembaga agama dalam masalah politik, sosial dan kebudayaan. (3), mereformasi bahasa yaitu merubah tulisan Arab dan diganti dengan tulisan Latin. (4), mereformasi hukum yaitu dengan menggantikan Undang-Undang Syariah yang berlaku di Turki kepada Undang-Undang Sipil Swiss. (5), mereformasi pendidikan.

Sekularisme Turki ini penting sebagai bahan tambahan pembelajaran pada mata kuliah sejarah Islam, karena Turki sebagai sebuah negara Islam yang kuat dan diperhitungkan dunia, dalam waktu yang relatif singkat dapat dirubah menjadi sebuah negara sekular oleh seorang Kemal Ataturk. Tindakan Kemal ini, disatu sisi dipuji disisi lain dia dicaci, tetapi yang pasti kondisi ini merupakan proses pembelajaran bagi dunia Islam dalam menghadapi perubahan pandangan zaman dengan dominasi dunia Barat terhadap berbagai aspek kehidupan dunia Timur termasuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an
- An-Na'im, Abdulahi Ahmed. *Islam dan Negara Sekular; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. 2007. Bandung. PT. Mizan Pustaka.
- Al-Qardhawy, Yusuf. 1996. *Islam Peradaban Masa Depan*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Ali, Mukti, 1994. *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*. Djambatan. Jakarta.
- Asari, Hasan. 2007. *Modernisasi Islam*. Citapustaka Media. Bandung.
- Asy Syannawi, Fahmi. 2006. *Fiqih Politik: Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kini*. Pustaka Setia. Bandung.
- Gibb, H.A.R. 1960 *Islam dan Lintasan Sejarah*. Bhatara. Jakarta.
- Thaha, Abdul Aziz. 1997. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Gema Insani Press. Jakarta
- Harahap, Syahrin. 1994 *Al-Qur'an dan Sekularisasi; kajian kritis terhadap pemikiran Thaha Husein*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Iqbal, Afzal. 1986. *Islamisation of Pakistan*. Vanguard Books Ltd Laore.
- Jameelah, Maryam. 1965. *Islam dan Modernisme*. Usaha Nasional. Surabaya
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Nehru, Jawaharlal. 1951. *Lintasan Sejarah Dunia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Niyazi, Berkes. 1964. *The development of Secularism*. McGill University Press.

- Montreal.
- Lewis, Bernard. 1968. *Emergence of Modern Turkey*. Oxford University Press, London.
- Romein, J.M. 1951. *Aera Eropa, Peradaban Eropa Sebagai Penyimpangan dari Pola Umum*. Ganaco. Bandung-Jakarta-Amsterdam.
- Qutb, Muhammad. 1986. *Ancaman Sekularisme; Sebuah Perbincangan Kritis Belajar dari Kasus Turki*. Shalahuddin Press. Yogyakarta.
- Rosenthal, Erwin.J.J. 1965. *Islam in Modern National State*. University Press Cambridge
- Sukarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi*. Penitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi. Jakarta.
- Turner, Bryan. S. 1984. *Atatürk's Republic of Culture*. New York: The Office of the Ambassador for Cultural Affairs, Republic of Turkey.
- Zainuddin, A. Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Gramedia. Jakarta.
- Ziya Gokalp. 1959. *Turkism Nationalism and Western Civilization*. Niyazi Berkes. London.